

MONITORING



Indonesia for Global Justice

FTA's HIGHLIGHT Edisi Agustus, 2018



FTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang terjadi disepanjang bulan mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk perkembangan putaran perundingan perjanjian perdagangan bebas dan isu mengenai perdagangan global

Pemerintah Harus Tepat Merespons Rupiah

- Dunia usaha meminta pemerintah tidak menempuh kebijakan yang tergesa-gesa, serampangan, dan menunjukkan kepanikan dalam merespons gejolak rupiah
- Langkah yang perlu ditempuh pemerintah dalam jangka pendek di antaranya menaikkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada proyek-proyek infrastruktur, memberikan insentif kepada pemasok kebutuhan proyek infrastruktur buatan dalam negeri, serta memperbanyak insentif fiskal kepada industri substitusi impor.
- pemerintah harus segera mengimplementasikan 16 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan bertahap sejak tiga tahun silam, menjalankan program hilirisasi, mendorong ekspor industri berdaya saing tinggi, serta memperbanyak perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement/FTA*) dengan negara-negara mitra dagang utama.
- Pemerintah juga harus mengencangkan kebijakan yang ramah bisnis (*business friendly*) serta menghapus atau membatalkan berbagai regulasi yang merugikan dunia usaha. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaring lebih banyak aliran investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*).

Utilisasi FTA Terbengkalai, Gejolak Domestik Mereda

- Utilisasi FTA Terbengkalai
- Gejolak Domestik Mereda
- Pemerintah Ambisius.
- Konsumsi Masyarakat Terus Dipacu
- Ekonomi Kuartal III Bisa Capai 5,3%
- Pajak Lebih Ramah di Tahun Politik
- Biaya untuk Kebijakan Insentif Fiskal dalam Tren Meningkat
- Anggaran PMN Melonjak Hampir Lima Kali Lipat.

Jokowi berharap negosiasi RCEP bisa selesai akhir tahun ini

- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengucapkan, dengan kondisi perekonomian dunia yang semakin tak menentu ini kedua negara menilai sangat penting untuk menguatkan kerja sama. Adapun kerjasama yang dimaksud tidak hanya dalam konteks bilateral, tapi juga integrasi ekonomi kawasan.
- Kondisi ekonomi dunia yang semakin tak menentu akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok
- Negosiasi RCEP Indonesia dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.
- Masih terdapat perbedaan visi 16 negara yang tergabung dalam RCEP
- Adanya evaluasi atas revisi ketiga tariff offer dari seluruh peserta RCEP. Tariff offer dilakukan untuk mencapai tariff commitment RCEP yang menguntungkan untuk semua peserta RCEP.

FTA: Penopang Ekspor yang Tidak Dimanfaatkan Secara Maksimal

- Indonesia belum memaksimalkan utilisasi pakta perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement/FTA*), yang seharusnya ampuh digunakan untuk mendongkrak nilai ekspor nonmigas Tanah Air.
- Data Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan, dari total surat keterangan asal (SKA) yang diterbitkan sepanjang semester I/2018,

nilai ekspor yang memanfaatkan FTA pada periode tersebut mencapai US\$61,22 miliar.

- Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) total nilai ekspor Indonesia sepanjang paruh pertama tahun ini mencapai US\$88,02 miliar. Artinya, mayoritas ekspor RI selama ini ditopang oleh pemanfaatan kerja sama perdagangan bebas.
- Hingga saat ini utilisasi FTA baru mencapai 34% dari segi pemanfaatan *form SKA* dari total potensi yang seharusnya mencapai US\$180,05 miliar.
- Untuk itu, pemerintah memacu sejumlah pakta perdagangan bebas baru seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

RI-Australia akan umumkan kesepakatan perdagangan bebas

- Australia dan Indonesia telah mencapai kesepakatan perdagangan bebas yang prinsip. Kesepakatan perdagangan bebas diharapkan bisa ditandatangani secara resmi pada akhir tahun ini.
- Belum ada rincian yang diumumkan mengenai ruang lingkup perjanjian perdagangan bebas tersebut. Para pejabat kedua negara telah menyelesaikan kebuntuan atas perjanjian perdagangan bebas selama negosiasi belum lama ini di Melbourne. Sekaligus membuka *jalan free trade agreement (FTA)* tersebut bisa ditandatangani pada bulan September atau Oktober tahun ini.
- juru runding perdagangan Indonesia Iman Pambagyo mengatakan, pihaknya terus terus menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Australia. Banyak celah telah ditutup, hanya ada beberapa masalah luar biasa yang harus dipecahkan.

Pengusaha Korsel Mendesak Perluasan Akses Pasar di Indonesia

- Pebisnis Korea Selatan meminta perluasan akses bahan baku dan barang jadi mereka ke pasar Indonesia melalui skema pembebasan bea masuk Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE)
- Peritel daring Korsel juga meminta agar Indonesia menghilangkan *de minimus value* atau pembebasan nilai bea masuk atau nilai cukai dengan batas tertentu atas barang impor yang dibeli melalui toko daring. Sebelumnya, barang perdagangan elektronik dengan nilai di bawah US\$100 dibebaskan bea masuknya.
- Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto, segala bentuk permintaan Korsel tersebut berpotensi terwujud apabila Indonesia dan Korsel menjalin kerja sama dagang bebas bilateral. Pasalnya, kesepakatan kerja sama dagang kedua negara saat ini baru terbingkai melalui Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA).
- Kemenperin menyatakan, tidak tertutup kemungkinan yang digunakan bukan skema FTA melainkan *preferential trade agreement* (PTA).
- Adapun, pakta dagang bilateral yang pernah digagas kedua negara, yakni Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), telah mandek pembahasannya sejak 2015.
- Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, selain persoalan revisi bea masuk, para pebisnis asal Korsel mengeluhkan proses perizinan di Indonesia.
- Nilai perdagangan RI-Korsel per akhir tahun lalu mencapai US\$16,31 miliar. Angka ini tercatat meningkat secara *year on year*, per akhir 2016 baru US\$13,68 miliar.
- Sepanjang tahun lalu pula, Korea Selatan menempati peringkat kelima sebagai investor yang paling banyak menanamkan kapital di Indonesia melalui 3.274 proyek senilai total US\$2,2 miliar.

Percepat FTA UE

- Sri Mulyani Indrawati menambahkan, seiring dengan banyaknya insentif yang diberikan, pemerintah masih optimistis investasi bisa tumbuh 7%.
- Badan Pusat Statistik mencatat, laju pertumbuhan investasi secara *year on year* sebesar 5,87%. Meski tetap tumbuh dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,34%, namun pertumbuhan investasi melambat dibanding kuartal I-2018 sebesar 7,95%.
- kalangan dunia usaha optimistis ekspor masih bisa ditingkatkan guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, para pengusaha berharap pemerintah segera menyelesaikan negosiasi *free trade agreement* (FTA) dengan Uni Eropa (UE) yang tengah berlangsung. FTA ini bisa memacu ekspor produk padat karya seperti alas kaki dengan memaksimalkan manfaat fasilitas *generalized system of preferences* (GSP)
- Industri alas kaki masih tertinggal jauh dengan Vietnam, tahun ini kami juga mewaspadai Kamboja yang ekspornya naik 450% jadi US\$ 1,8 miliar.

Insentif Devisa dan Ekspor

- Di pasar saham, asing menguasai hampir separuh kepemilikan saham emiten yang tercatat di bursa. Investor asing juga memegang sekitar 40% surat berharga negara (SBN).
- Selain itu, Indonesia memiliki utang luar negeri yang tinggi, baik utang pemerintah maupun swasta. Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2018 tercatat sebesar US\$ 358,6 miliar atau setara hampir Rp 5.000 triliun. Utang tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar US\$ 182,5 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sekitar US\$ 176 miliar.
- secara *de facto* perekonomian nasional sangat tergantung pada luar negeri. Dengan eksposur utang dan kepemilikan asing yang demikian tinggi, nilai tukar rupiah menjadi rawan gejolak. Rupiah mudah loyo apabila dana-dana asing di portofolio hengkang atau kabur, baik karena tarikan kenaikan suku bunga global maupun akibat sentimen negatif domestik.

- Rupiah juga tidak berdaya manakala banyak utang luar negeri yang jatuh tempo atau terjadi musim pembayaran dividen korporasi di Indonesia kepada pemegang saham di luar negeri.
- Cadangan devisa yang ada di Bank Indonesia mudah tergerus jika dipakai untuk intervensi di pasar valas maupun pasar obligasi, sebagai aksi untuk menstabilkan rupiah. Saat ini, cadangan devisa nasional yang beberapa bulan lalu masih sebesar US\$ 132 miliar, kini tinggal tersisa US\$ 118,3 miliar. Stok devisa itu hanya cukup untuk membiayai 6,7 bulan impor dan pembayaran cicilan utang luar negeri pemerintah.
- Neraca perdagangan kian mengkhawatirkan. Selama semester I-2018, neraca perdagangan Indonesia menderita defisit sebesar US\$ 1,02 miliar. Ironisnya, tidak semua devisa hasil ekspor (DHE) dibawa pulang, dan hanya sebagian yang dikonversi ke rupiah.
- Merujuk pada data Bank Indonesia, sekitar 85-90% devisa hasil ekspor sudah dibawa pulang ke Indonesia. Sisanya, sekitar 10-15% dipakai oleh eksportir untuk membayar kewajiban cicilan utang kepada kreditur di luar negeri atau untuk modal pembelian bahan baku. Dari sekitar 85-90% devisa yang dibawa pulang tersebut, hanya 20- 25% yang dikonversi ke dalam rupiah. Karena itu, pemerintah minta para eksportir mengonversi seluruh DHE ke dalam rupiah, guna memperkuat cadangan devisa.
- Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement/ FTA*) dengan sejumlah negara dan menempuh diplomasi bilateral, di tengah tendensi proteksionisme yang melanda dunia.
- Kita semua harus menyadari bahwa sumber dalam negeri hanya mampu membiayai sekitar 50% dari kebutuhan perekonomian nasional. Itu berasal dari perbankan dengan porsi 35% dan 10-15% dari lembaga keuangan nonbank. Artinya, separuh kekurangannya harus didanai dari luar negeri. Padahal, sumber untuk membayar kembali dana-dana asing tersebut mau tidak mau berasal dari devisa, terutama hasil ekspor.

Trump Klaim Perundingan NAFTA dengan Meksiko Berjalan Lancar

- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perundingan dengan Meksiko terkait reformasi Pakta Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) berjalan lancar.
- Namun, dia menambahkan, Kanada tetap harus menunggu sedikit lagi untuk kembali bergabung ke dalam perundingan pakta perdagangan bebas tersebut.

Menggenjot Pertumbuhan

- Tidak mudah bagi pemerintah untuk menggapai laju pertumbuhan di atas 6%. Dalam empat tahun terakhir, 2014-2017, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5%. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi juga belum beranjak meski pada kuartal kedua 2018 ada pertumbuhan 5,27%.
- Pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan APBN 2018 adalah 5,4% dan RAPBN 2019 disusun dengan asumsi laju pertumbuhan ekonomi 5,2%- 5,6%. Sebuah *range* yang cukup jauh akibat ketidakpastian ekonomi. Masa kampanye pemilihan presiden (pilpres), yang akan dimulai Oktober 2018, akan diwarnai isu ekonomi.
- Demikian pula dengan isu kesenjangan dan ketimpangan ekonomi. Dilantik menjadi presiden RI, 20 Oktober 2014, Jokowi menyaksikan laju pertumbuhan ekonomi di tahun politik itu 5,02%. Di awal pemerintahannya, 2015, ekonomi mengkerut dengan laju pertumbuhan 4,79%. Dua tahun berikut, 2016 dan 2017, ekonomi hanya bertumbuh 5,02% dan 5,07%.
- Tahun ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tak lebih dari 5,2% meski asumsi APBN 2018 disusun dengan asumsi laju pertumbuhan 5,4%. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan di bawah 5,6%. Dengan laju pertumbuhan hanya sekitar 5%, sulit bagi pemerintah untuk mendongkrak PDB per kapita dan memangkas angka pengangguran dalam jumlah signifikan.
- Pada Februari 2018, pengangguran terbuka 6,87 juta atau 5,13% dari total angkatan kerja yang mencapai 133,94 juta. Turun 140.000 dari angka setahun sebelumnya. Namun, jumlah tenaga setengah penganggur dan pekerja paruh waktu justru meningkat selama periode yang sama.

- Dengan laju pertumbuhan 5%, sulit bagi pemerintah untuk mendorong PDB per kapita. Pada tahun 2017, PDB per kapita berdasarkan harga berlaku Rp 51,89 juta atau US\$ 3.876. Tanpa pelemahan nilai tukar rupiah, PDB per kapita Indonesia bisa di atas S\$ 4.000.
- Ekonomi AS mencatat pertumbuhan mengesankan. Tapi, bagi Indonesia, perkembangan itu justru menekan ekonomi nasional. Kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve (Fed), bank sentral AS, merugikan ekonomi Indonesia. Karena kenaikan fed fund rate (FFR) mengakhiri rezim bunga rendah di Tanah Air.
- Saat ini, perbankan menaikkan suku bunga simpanan yang sudah sempat mencapai satu digit. Gendang perang dagang yang ditabuh Presiden AS Donald Trump bukan hanya berdampak pada ekonomi Tiongkok. Negara lain juga terkena dampak. Produk yang tidak bisa diekspor ke AS akan diarahkan ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Kenaikan bea masuk (BM) tidak saja diperlakukan kepada produk RRT, melainkan juga dikenakan kepada produk negara lain.
- Tahun ini, belanja modal pemerintah kemungkinan besar tidak merata. Karena hingga Juni, realisasi belanja modal baru Rp 40,75 triliun atau 19,99% dari pagu APBN 2018. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, belanja modal mencapai 21,14% dari pagu APBN 2017. Artinya, terjadi penurunan dalam realisasi belanja modal. Belanja modal sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
- Pemerintah perlu *all out* mendorong ekspor. Membaiknya harga komoditas perlu dimanfaatkan dengan membuka pasar baru di luar Tiongkok dan India. Batu bara dan CPO dibutuhkan banyak negara di Afrika dan Asia. Dengan Uni Eropa, Indonesia tidak perlu ragu menandatangani *free trade agreement* (FTA). Ekspor Vietnam sudah menyalip Indonesia, antara lain, berkat FTA negara itu dengan Uni Eropa.

Penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 92,88 triliun

- Penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai mengalami peningkatan yang signifikan, atau sebesar 16,39%. Pertumbuhan tersebut tertinggi sejak 2015.
- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan, realisasi total penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp92,88 triliun
- Secara rinci, penerimaan dari bea masuk telah mencapai 59,99% atau tumbuh 14,61%.
- Aktivitas impor yang meningkat sebesar 8,58% juga ditopang adanya program penerbitan impor beresiko tinggi (PIBT) yang menjadi faktor pendorong tumbuhnya penerimaan bea masuk, padahal masih dibayangi utilisasi Free Trade Agreement (FTA) yang terus tumbuh. Pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen penerimaan bea keluar yang mencapai 98,95%

Sinyal buruk kenaikan PPh Impor

- Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang pengenaan tarif baru PPh barang impor.-
- Pengenaan PPh barang impor sebenarnya merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan aturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Ada tiga tarif PPh barang impor yakni 10%, 7,5%, 5%, dan 2,5% dari nilai impor. Besaran tarif berlaku berbeda-beda di setiap jenis barang. saat ini pemerintah sedang giat dengan upaya untuk membuka pasar melalui perundingan perdagangan bebas atau *free trade agreement* (FTA) dan menarik investasi.

Industri Panas Dingin

- pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membatasi impor barang konsumsi yang masuk ke Indonesia.
- Barang konsumsi tadi diidentifikasi lebih dari 500 jenis komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri.
- Dunia usaha merespons negatif rencana pemerintah membatasi impor barang konsumsi.
- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman menolak rencana pembatasan impor barang konsumsi. Menurutnya, pembatasan impor kerap terkendala sejumlah faktor. Salah satunya nomor Harmonized System Code (HS) produk tersebut.

Pengusaha sambut baik negosiasi IA-CEPA yang sudah mencapai titik akhir

- Negosiasi Australia dan Indonesia soal *free trade agreement* (FTA) atawa *Indonesia-Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement* (IA-CEPA) akhirnya mencapai titik terang.
- Sekaligus membuka jalan FTA tersebut bisa ditandatangani pada bulan September atau Oktober tahun ini.
- Kadin sendiri selama ini mendukung dari sisi prosesnya dan menyambut baik, akhir bisa diselesaikan untuk kepentingan Indonesia.
- Kadin menjelaskan ada beberapa perjanjian perdagangan dalam IA-CEPA. Diantaranya, *pertama*, penurunan tarif di IA-CEPA ditargetkan lebih cepat dari penurunan tarif di ASEAN- Australia- Selandia Baru. Jadi produk seperti *apparel*, *footwear* dan otomotif bisa menggunakan skema tarif 0% di perjanjian bilateral ini. *kedua*, sektor agrikultur, *Ketiga*, sektor makanan dan minuman yang juga pelaku usahanya bisa memperoleh bahan baku dari produk lebih murah asal Australia. *Keempat*, mengenai pendidikan dan kesehatan akan ada investasi dari Australia yang bekerjasama dengan pelaku usaha Indonesia. *Kelima*, soal standar produk. *Keenam*, mengenai tenaga kerja yang terampil untuk bisa bekerja di Australia.

CEPA, Kongsinya Ekonomi RI-Australia yang Butuh Waktu 13 Tahun

- Rencana kerja sama komprehensif Indonesia dan Australia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) diperkirakan akan rampung tahun ini.
- CEPA berbeda dengan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral lain seperti Free Trade Agreement (FTA). Sebab, cakupan kerja sama IA CEPA tidak hanya di perdagangan, melainkan juga kebebasan perdagangan jasa termasuk jasa keuangan dan telekomunikasi, investasi, hingga perdagangan elektronik.
- Hingga Juni 2018, perundingan IA CEPA sudah memasuki putaran ketujuh, di mana seluruh perundingan berkecukupan di tiga bahasan, yakni perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi.
- Dalam kajian Kemendag sebelumnya, pelaksanaan IA CEPA memang bisa bikin Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat 0,23 persen melalui liberalisasi perdagangan.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor Indonesia ke Australia tercatat US\$1,34 miliar dengan nilai impor US\$2,71 miliar sepanjang semester I 2018. Artinya, Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan US\$1,37 miliar dalam enam bulan pertama tahun ini. Meski begitu, angka defisit ini membaik 18,11 persen ketimbang tahun kemarin.

Agenda penting Bulan September 2018

A. Agenda Asia Pacific Gathering on Human Rights and Extractives, 1-4 September, Jawa Tengah, Indonesia 2018

<http://igj.or.id/solidaritas-asia-pasifik-untuk-mendukung-pemilu-indonesia-bebas-dari-oligarki-ekstraktif/>

Sekretariat IGJ

Komplek PLN, Jl.Laboratorium No.7, Duren Tiga, Pancoran,
Jakarta Selatan 12760, Indonesia

Kontak

Telp: +62 21 7984552

Email: igj@igj.or.id

Website: www.igj.or.id